

The background of the book cover is a composite image. The top half shows a dense city skyline with various skyscrapers. Overlaid on this are several semi-transparent silhouettes of people, some of which contain images of green, hilly landscapes. The bottom half of the cover features a close-up of a young woman with dark hair, wearing a black jacket, with her right arm raised in a gesture. The overall color palette is dark, with greys, blacks, and muted blues, accented by the red text and the green in the silhouettes.

B PENERBIT
BUKULOKA

HUKUM RESPONSIF, TATA KELOLA, DAN **WAJAH BARU KEADILAN** DI **MASYARAKAT YANG KRITIS**

Dr. Safitri Wikan Nawang Sari, SH., MH.

Hukum Responsif, Tata Kelola Negara, dan Wajah Baru Keadilan di Masyarakat yang Kritis

Dr. Safitri Wikan Nawang Sari, SH., MH.

PT BUKULOKA LITERASI BANGSA

Anggota IKAPI: No. 645/DKI/2024



Hukum Responsif, Tata Kelola Negara, dan Wajah Baru Keadilan di Masyarakat yang Kritis

Penulis : Dr. Safitri Wikan Nawang Sari, SH., MH.
ISBN : 978-634-324-049-5 (PDF)
Penyunting Naskah : Bunga Agustia Rofika
Tata Letak : Bunga Agustia Rofika
Desain Sampul : Novikean Keysah Sanisri

Penerbit

Penerbit PT Bukuloka Literasi Bangsa

Distributor: PT Yapindo

Kompleks Business Park Kebon Jeruk Blok I No. 21, Jl. Meruya Ilir Raya
No. 88, Desa/Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota
Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 11620

Email: penerbit.blb@gmail.com

Whatsapp: 0878-3483-2315

Website: bukuloka.com

© Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Ketentuan Pidana Sanksi Pelanggaran Pasal 2 UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan prebuttal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku referensi berjudul “*Hukum Responsif, Tata Kelola, Negara dan Wajah Baru Keadilan di Masyarakat yang Kritis*” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Melalui pembahasan yang disusun secara jelas dan komunikatif, buku ini menguraikan bagaimana hukum responsif berkembang dalam dinamika masyarakat modern, serta bagaimana tata kelola pemerintahan, peran negara, dan meningkatnya kesadaran kritis masyarakat turut membentuk wajah baru keadilan di era kontemporer.

Buku ini diterbitkan untuk masyarakat umum, sehingga dapat diakses dan dipahami oleh siapa pun yang membutuhkan pemahaman terkait perkembangan hukum dan keadilan dalam kehidupan sosial. Diharapkan buku ini mampu menambah wawasan, meningkatkan kesadaran hukum, serta menjadi referensi dalam memahami pentingnya keadilan yang lebih substantif di tengah masyarakat yang terus berkembang.

Jakarta, Juli 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1: Mengapa Hukum Harus Terus Berubah — dan Siapa yang Mendorongnya	1
1.1 Hukum yang Statis di Tengah Masyarakat yang Dinamis: Bahaya Ketertinggalan.....	1
1.2 Tekanan dari Bawah: Gerakan Sosial sebagai Penggerak Reformasi Hukum	3
1.3 Tekanan dari Atas: Komitmen Internasional yang Mewajibkan Perubahan.....	5
1.4 Tekanan dari Samping: Teknologi yang Memaksa Hukum Berlari.....	7
1.5 Reformasi Hukum yang Nyata vs Reformasi Kosmetik: Membedakan Keduanya.....	9
1.6 Jalur Ketergantungan dalam Hukum: Alam Perubahan Selalu Sulit	11
1.7 Pengusaha Hukum: Individu dan Kelompok yang Mendorong Perubahan Hukum.....	13
1.8 Momentum Hukum: Kapan Perubahan Bisa Terjadi dan Kapan Tidak	15
1.9 Resistensi terhadap Reformasi: Aktor, Strategi, dan Cara Mengatasinya	17

1.10 Peta Reformasi Hukum Indonesia: Yang Sudah, Yang Sedang, Yang Belum	19
--	----

Bab 2: Tata Kelola Negara dan Hukum Administrasi yang Harus Berubah 22

2.1 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik sebagai Standar, Bukan Slogan: Kriteria dan Pengukuran	22
---	----

2.2 Hukum Administrasi Negara di Era Digital: Keputusan Elektronik dan Implikasinya	25
---	----

2.3 OSS dan Perizinan Digital: Kemajuan yang Membawa Persoalan Baru.....	28
--	----

2.4 Akuntabilitas Birokrasi: Mekanisme yang Ada dan yang Perlu Diperkuat.....	30
---	----

2.5 Diskresi Pejabat Publik: Batasan Hukum dan Tanggung Jawab Gugat.....	32
--	----

2.6 Ombudsman Indonesia: Kapasitas, Kewenangan, dan Efektivitasnya.....	34
---	----

2.7 Pemerintahan Terbuka: Transparansi Anggaran dan Kebijakan sebagai Hak	36
---	----

2.8 Pelapor dalam Administrasi Publik: Perlindungan yang Tidak Memadai.....	38
---	----

2.9 Evaluasi Kinerja Lembaga Negara: Siapa Menilai dan dengan Standar Apa.....	40
--	----

2.10 Reformasi Birokrasi: Di Balik Angka dan Sertifikat	42
---	----

Bab 3: Hukum Ekonomi dan Keadilan Pasar yang tidak Netral 45

3.1 Hukum Ekonomi sebagai Pengatur, Bukan Sekadar Pelayan Pasar	45
3.2 Regulasi Persaingan Usaha dan Dominasi Platform Digital....	47
3.3 KPPU dan Penegakan Hukum Persaingan: Kapasitas vs Tantangan.....	49
3.4 Hak Konsumen di Era Digital: Perlindungan yang Tertinggal	50
3.5 Hukum Perlindungan Investasi dan Dampaknya pada Regulasi Publik	52
3.6 BUMN dan Tata Kelola: Antara Orientasi Publik dan Tekanan Komersialisasi.....	54
3.7 Hukum Keuangan Digital: Kripto, Pinjol, dan Kerangka Regulasi yang Berlari.....	55
3.8 Platform Hak Pekerja: Status Hukum yang Tidak Pasti	57
3.9 Hukum Pajak dan Keadilan Fiskal: Siapa yang Menanggung Beban Terbesar	58
3.10 Hukum Ekonomi yang Inklusif: Konsep, Pengukuran, dan Agenda	60
Bab 4: Pluralisme Hukum dan Keberagaman yang Harus Dikelola	63
4.1 Pluralisme Hukum Indonesia: Realita yang Tidak Bisa Diabaikan	63
4.2 Hukum Adat dalam Sistem Nasional: Pengakuan yang Setengah Hati.....	65
4.3 Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia: Ruang, Batas, dan Negosiasi.....	67

4.4 Syariat Aceh sebagai Pluralisme Asimetris: Evaluasi Komprehensif.....	69
4.5 Norma Konflik dalam Masyarakat Majemuk: Penyelesaian dan Hirarki	72
4.6 Hak Ulayat dan Modernisasi: Ketika Dua Sistem Bertabrakan	74
4.7 Pluralisme Hukum sebagai Kekuatan Sistem Hukum, Bukan Kelemahan	76
4.8 Perkawinan Lintas Agama dan Etnis: Kekosongan Hukum yang Membebani.....	79
4.9 Peradilan Adat sebagai Alternatif: Legitimasi, Fungsi, dan Batas	81
4.10 Harmonisasi Tanpa Penyeragaman: Prinsip Pengelolaan Pluralisme Hukum.....	84
Bab 5: Hukum Pidana dan Paradigma Keadilan yang Bergeser	87
5.1 KUHP Baru: Apa yang Berubah, Apa yang Dipertahankan, dan Apa yang Kontroversial	87
5.2 Keadilan Restoratif: Dari Pinggiran ke Arus Utama Hukum Pidana.....	89
5.3 Hak Korban: Korban yang Akhirnya Mulai Dilihat dalam Sistem Pidana.....	91
5.4 Dekriminalisasi: Perdebatan Ganja Medis, Aborsi, dan Konsensus Sosial.....	93
5.5 Lapas Overcrowding sebagai Krisis Konstitusional yang Diabaikan	95

5.6 Hukum Pidana dan Anak: Diversi, Rehabilitasi, dan Batas Pemidanaan	98
5.7 Hukum Mati: Posisi Indonesia di Antara Abolisionis Global	100
5.8 Penegakan Hukum Pidana yang Tidak Konsisten: Data dan Analisis.....	102
5.9 Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana: Pertanggungjawaban yang Belum Kuat	104
5.10 Hukum Pidana dan Kebebasan Sipil: Garis Merah yang Tidak Boleh Dilampaui	107
Bab 6: Hukum dan Perempuan — Kesetaraan yang Terus Diperjuangkan.....	111
6.1 Hukum Kesetaraan Gender: Norma yang Ada dan Jarak dengan Realita	111
6.2 UU TPKS: Perjuangan Panjang, Isi Substansif, dan Tantangan Implementasi.....	118
6.3 Kekerasan Berbasis Gender Online: Regulasi yang Belum Siap	121
6.4 Perempuan dalam Profesi Hukum: Representasi, Hambatan, dan Kemajuan	123
6.5 Hukum Keluarga dan Kesetaraan: Perkawinan, Perceraian, dan Warisan	125
6.6 Hak Reproduksi Perempuan: Ruang Hukum yang Sempit dan Diperebutkan.....	128
6.7 Perda Diskriminatif terhadap Perempuan: Peta, Kasus, dan Penanganan	131

6.8 Teori Hukum Feminis dalam Konteks Indonesia: Perkembangan dan Relevansi	133
6.9 Perempuan Kepala Keluarga dan Perlindungan Hukum: Kekosongan yang Nyata	136
6.10 Agenda Reformasi Hukum Gender di Indonesia: Prioritas dan Strategi	138
Bab 7: Hukum Internasional dan Kedaulatan Negara yang Bernegosiasi.....	142
7.1 Kedaulatan dalam Era Interdependensi: Konsep yang Terus Bergeser	142
7.2 Perjanjian Internasional dan Implementasinya dalam Hukum Nasional	145
7.3 Penyelesaian Sengketa Investor-Negara: Ketika Korporasi Menggugat Negara.....	148
7.4 Hukum Pengungsi dan Kebijakan Indonesia: Non-Refoulement dalam Praktik	150
7.5 Hukum Laut Internasional dan Sengketa Wilayah Indonesia	152
7.6 Perjanjian Perdagangan Internasional dan Dampak Regulasi Domestik	154
7.7 Hak Asasi Manusia Internasional sebagai Standar Minimum Nasional	156
7.8 Pengadilan Internasional dan Posisi Indonesia: Keterlibatan dan Resistensi	158
7.9 Soft Law Global dan Pengaruhnya pada Terbentuknya Hukum Nasional	160

7.10 Indonesia sebagai Aktor Pembentuk Norma Regional: Peluang dan Keterbatasan	162
Bab 8: Korupsi, Antikorupsi, dan Hukum yang Diuji	164
8.1 Korupsi sebagai Patologi Hukum, Bukan Sekadar Kejahatan Perorangan	164
8.2 Revisi Pasca KPK: Perbandingan Kapasitas dan Independensi Sebelum-Sesudah	167
8.3 Tindak Pidana Pencucian Uang: Regulasi dan Efektivitas Penegakan	169
8.4 Korupsi Politik: Hubungan Partai, Pengusaha, dan Pejabat yang Sistemik.....	177
8.5 Gratifikasi dan Benturan Kepentingan: Regulasi yang Ada dan yang Perlu Ditambah.....	179
8.6 Pemulihan Aset: Mengapa Pengembalian Aset Negara Selalu Gagal	182
8.7 Korupsi di Daerah: Desentralisasi yang Mendistribusikan Korupsi.....	185
8.8 Teknologi Anti Korupsi: e-Procurement, LHKPN, dan Potensinya	187
8.9 Budaya Hukum dan Korupsi: Mengapa Sistem Baik Tidak Cukup	189
8.10 Agenda Reformasi Anti-Korupsi Berbasis Riset: Dari Akademisi ke Kebijakan	191
Bab 9: Hukum dan Teknologi — Mengatur yang Belum Dipahami Penuh.....	195

9.1 AI dan Tanggung Jawab Hukum: Siapa yang Bertanggung Jawab atas Keputusan Mesin?.....	195
9.2 Regulasi Data Pribadi: UU PDP dan Jarak dari Standar Global	197
9.3 Platform Digital sebagai Badan Kuasi Regulasi: Kekuasaan Tanpa Akuntabilitas	199
9.4 Kejahatan Siber: Tipologi, Regulasi, dan Ketidakmampuan Penegakan	201
9.5 Deepfake dan Hukum: Identitas, Fitnah, dan Perlindungan yang Belum Ada	203
9.6 Blockchain dalam Sistem Hukum: Kontrak, Bukti, dan Pendaftaran Aset	205
9.7 Kecerdasan Buatan di Pengadilan: Alat Bantu atau Pengganti Hakim?.....	207
9.8 Regulasi Fintech: Antara Mendorong Inovasi dan Melindungi Konsumen	209
9.9 Hak Digital dalam Konstitusi: Apakah Indonesia Perlu Melakukan Amandemen Khusus?	211
9.10 Etika Teknologi dan Hukum: Standar yang Perlu Dibangun Bersama.....	213
Bab 10: Hukum Kesehatan dan Pandemi Sebagai Laboratorium Regulasi	216
10.1 Hak atas Kesehatan sebagai Hak Konstitusional: Substansi dan Pengukuran.....	216
10.2 Pandemi COVID-19 dan Respons Hukum Indonesia: Evaluasi Kritis.....	218

10.3 Regulasi Karantina dan Hak Warga: Batas yang Tidak Boleh Dilampaui.....	220
10.4 Vaksinasi Wajib dan Hak Individu: Ketegangan yang Diselesaikan Hukum	222
10.5 Hukum Telemedis: Peraturan yang Lahir dari Darurat dan Kini Permanen.....	224
10.6 BPJS dan Hak Jaminan Kesehatan: Evaluasi Satu Dekade .	226
10.7 Tanggung Jawab Hukum Tenaga Medis: Malpraktik dan Batas Perlindungan	227
10.8 Hak Pasien: Informed Consent, Rekam Medis, dan Otonomi dalam Pengobatan	229
10.9 Regulasi Farmasi dan Perlindungan Konsumen Obat.....	231
10.10 Kesiapan Regulasi untuk Pandemi Berikutnya: Agenda yang Tidak Bisa Ditunda	233
BAB 11: Identitas Nasional, Pluralisme, dan Hukum yang Harus Adil Untuk Semua.....	236
11.1 Pancasila sebagai Hukum Hidup: Implementasi, Bukan Sekadar Ideologi	236
11.2 Bhinneka Tunggal Ika dalam Sistem Hukum: Tantangan dan Ketegangan.....	238
11.3 Hukum Anti Diskriminasi: Apa yang Ada dan Apa yang Masih Kurang.....	240
11.4 Perlindungan Masyarakat Adat: Konstitusi, UU, dan Realita di Lapangan.....	242
11.5 Etnis dan Hukum: Dari Diskriminasi Historis ke Kesetaraan yang Diperjuangkan	244

11.6 Agama dan Identitas Hukum: Ketika Keyakinan Bertemu Regulasi Negara	246
11.7 Kebebasan Berpikir dan Berkeyakinan: Hak yang Paling Sering Dikurangi Diam-diam	248
11.8 Identitas Gender dalam Administrasi Hukum: Data, Regulasi, dan Diskriminasi	251
11.9 Hukum dan Rekonsiliasi: Menyembuhkan Luka Sejarah melalui Instrumen Hukum	253
11.10 Hukum yang Adil untuk Semua: Bukan Visi, Melainkan Kewajiban Konstitusional	254
BAB 12: Riset Hukum Responsif dan Agenda Untuk Akademisi Muda	257
12.1 Lahirnya Hukum yang Relevan: Pertanyaan yang Lahir dari Masalah Nyata.....	257
12.2 Prosedur Campuran dalam Riset Hukum: Menggabungkan Kekuatan Normatif dan Empiris	259
12.3 Riset Hukum Komparatif: Metodologi dan Batasan yang Harus Disadari	260
12.4 Penelitian Hukum Berbasis Komunitas: Keterlibatan yang Etis	262
12.5 Analisis Kebijakan Berbasis Hukum: Dari Akademisi ke Pembuat Regulasi.....	263
12.6 Skripsi dan Tesis yang Dibutuhkan: Topik yang Paling Relevan Saat Ini	265
12.7 Jurnal Hukum Nasional Terakreditasi: Daftar, Standar, dan Cara Masuk	266

12.8 Jurnal Hukum Internasional untuk Peneliti Indonesia: Peluang dan Strategi268

12.9 Komunitas Riset Hukum: Membangun Jaringan Akademisi Muda yang Kritis269

12.10 Tanggung Jawab Akademisi Hukum: Riset yang Mengubah, Bukan Sekadar Memenuhi Kewajiban.....270

Daftar Pustaka..... 273

Profil Penulis285

Daftar Pustaka

- Adelia, D. (2026). Restorative Justice sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*
<https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6625>
- Ainuddin, A. (2021). Covid-19 Pandemic Reviewed in Constitutional Law Perspective. *Jurnal Ius*.
<https://doi.org/10.29303/ius.v9i3.980>
- Anggara, I. (2026). Legal Liability of Artificial Intelligence in Criminal Law: A Comparative Study between Indonesia and European Union. *Indonesian Journal of Law and Justice*.
<https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i3.5565>
- Anjani, D. R., Hasibuan, I., Nahfani, A., & Subroto, A. (2026). CUSTOMARY LAND CONFLICTS BETWEEN DAYAK INDIGENOUS LAW AND STATE LAW IN INDONESIA. *Awang Long Law Review*.
<https://doi.org/10.56301/awl.v8i2.2045>
- Anshar, S., & Ifing, B. (2025). NEGARA HUKUM DAN PLURALISME AGAMA; TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK MINORITAS BERAGAMA DI INDONESIA. *Ensiklopedia Sosial Review*.
<https://doi.org/10.33559/esr.v7i2.3108>
- Artono, H. (2022). Legal Protection of Patients and Health Workers Rights in the Covid-19 Pandemic. *Proceedings of the 4th*

International Conference on Indonesian Legal Studies, ICILS
2021, June 8-9 2021, Semarang, Indonesia.
<https://doi.org/10.4108/eai.8-6-2021.2314332>

Atqiya, A. N., Nasoha, A. M. M., Andini, D. S., Safa`atun, D.,
Pratama, A. P., & Arfiantama, R. (2024). Pancasila Seagai
Sumber Hukum Tata Negara: Implikasi Terhadap
Pembentukan Undang – Undang di Indonesia.
KOHCEHCYC.
<https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i5.442>

B, N. K. (2026). THE RISE OF FINTECH: LEGAL CHALLENGES
AND OPPORTUNITITES CRYPTOCURRENCY,
BLOCKCHAIN, AND SMART CONTRACTS: LEGAL
DIMENSIONS. Indian Journal of Legal Review.
<https://doi.org/10.65393/maoi7748>

Bustomi, Y. (2024). Conflict Between Health Law and Territorial
Quarantine Law Regarding the Provision of COVID-19
Vaccine. Unnes Law Journal.
<https://doi.org/10.15294/ulj.v7i1.38751>

Cahyani, D., & Slam, Z. (2025). UUD NKRI 1945 dan Perlindungan
Hak Asasi Perempuan: Antara norma dan Realitas dalam
Kasus Kekerasan. Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian
Pendidikan Kewarganegaraan.
<https://doi.org/10.33061/jgz.v14i1.12722>

Caruso, E. (2026). Becoming legal: feminism and abortion law in
1970s Italy. Journal of Law and Society (Print).
<https://doi.org/10.1111/jols.70054>

- Damaitu, E. R. (2025). PLURALISM AND SOCIAL JUSTICE IN PANCASILA DEMOCRACY: BETWEEN IDEALS AND REALITY. Constitutional Law Society. <https://doi.org/10.36448/cls.v4i01.103>
- Dicksan, I. (2026). Implementation of Good Governance in Digital-Based Public Services in Local Government. Riwayat: Educational Journal of History and Humanities. <https://doi.org/10.24815/riwayat.v9i1.576>
- Djatismiko, M. (2024). FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEPALA DAERAH (GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA) DI INDONESIA. Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian Dan Anti Korupsi. <https://doi.org/10.31599/dqwm8p13>
- Fadlail, Ach. (2024). Demokrasi Pancasila: Landasan Nilai Dan Prinsipnya Dalam Membangun Sistem Dan Etika Politik Indonesia. JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i1.3995>
- Firmansyah, Y., & Afladhanti, P. M. (2025). Legal Responsibility of Medical Personnel in Cases of Malpractice in Telemedicine. LITERACY: International Scientific Journals of Social, Education, Humanities. <https://doi.org/10.56910/literacy.v4i2.2467>
- Firmansyah, Y., & Utomo, St. L. (2021). A Hospital's Legal Responsibility For Patient Rights During The Covid-19 Pandemic - A Review From The Health Sector's Law

Regulations. Jurnal Indonesia Sosial Sains.
<https://doi.org/10.36418/jiss.v2i8.392>

Hamzani, A. I., Wibowo, D. E., Sami'an, S., & Rusli, M. H. M. (2026). Trends in the Use of Data Analysis Methods in Legal Research (Analysis of Scopus-Indexed Law Journals in Indonesia and Malaysia). International Journal of Legal Information : Official Publication. <https://doi.org/10.1515/ijli-2025-0002>

Hidayat, A., & Frinaldi, A. (2025). The Evolution and Contemporary Relevance of Administrative Law in Modern Government Governance. Journal of Social Research. <https://doi.org/10.55324/josr.v5i1.2926>

Indayani, E., Aziz, S. A. B., & Andarini, V. (2025). PERSPEKTIF DAN SOLUSI ANTARA HUKUM PERKAWINAN DAN KESETARAAN GENDER DI INDONESIA. Journal of Gender Equality and Social Inclusion (Gesi). <https://doi.org/10.38156/gesi.v4i2.197>

Iskandar, H., Hasbi, Y., Idami, Z., & Saputra, F. (2025). Islamic Law and the Constitution: Analyzing the Compatibility of Religion-Based Legislation in Indonesia. Al-Qadha. <https://doi.org/10.32505/qadha.v12i2.11652>

Ismarani, N., Putri, D. N. K., Syaharani, N., Akhiryani, Y., Nurjanah, Z., & Sari, I. (2025). BETWEEN SHARIA PROHIBITIONS AND LEGAL VACUUM. MAQASHID. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v8i2.2308>

- Jasim, R., Isra, S., Warman, K., & Andora, H. (2025). Challenges in the Implementation of Free Prior and Informed Consent for Indigenous Peoples in Indonesia's National Legal Regulation. *Eduvest - Journal Of Universal Studies*. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v5i7.50779>
- Kandia, W., & Wiryawan, W. (2025). LAW AS AN INSTRUMENT OF SOCIAL TRANSFORMATION: A THEORETICAL AND EMPIRICAL STUDY OF THE ROLE OF LAW IN DRIVING CONTEMPORARY SOCIETAL CHANGE. *International Journal of Education and Social Science Studies*. <https://doi.org/10.60153/ijesss.v1i2.201>
- Kansil, C. S. t., & Ulataqiy, A. J. (2024). The Role of the State in Health Law Enforcement in Indonesia: A Constitutional Law Perspective. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*. <https://doi.org/10.57235/qistina.v3i2.4131>
- Kencanawati, F., Hermawan, A., Baihaqi, S., & Septiani, A. N. (2025). KONDISI KESETARAAN GENDER DI INDONESIA. *Jurnal Dinamika Sosial Dan Sains*. <https://doi.org/10.60145/jdss.v1i4.88>
- Kontu, F., & Pesak, S. (2025). Kuota 30% Perempuan di Parlemen: Implementasi dan Efektivitasnya di Indonesia. *Papsel Journal of Humanities and Policy*. <https://doi.org/10.63185/pjhp.v2i1.83>
- Krivova, A., & Afonin, M. V. (2025). The Transformation of the Principle of State Sovereignty in the Context of Supranational

Regulation and Global Challenges. Международное Право.

<https://doi.org/10.25136/2644-5514.2025.4.75315>

Kusady, D. A. (2026). Application of Essential Facilities Doctrine to Data and Algorithm Access As An Enforcement Instrument for Article 25 of Law No. 5 Of 1999 in The Digital Economy. Journal of Law, Politic and Humanities.

<https://doi.org/10.38035/jlph.v6i2.3059>

Kushwah, Dr. J. P., & Kushwah, S. P. S. (2024). Integrating Empirical and Doctrinal Research: A Comparative Analysis of Their Contributions to Legal Scholarship. Legal Research Development. <https://doi.org/10.53724/lrd/v9n2.2>

M.Yusuf, D., Putra, B., Sebayang, R., Zulkarnaini, Turnip, R. W., Saputra, H., & Info, A. (2025). PERUBAHAN PIDANA DARI KUHP LAMA KE BARU SALAH SATU ADALAH REFORMASI PENEGAKAN HUKUM. College Student Journal. <https://doi.org/10.56301/csj.v8i2.2008>

Mardiana, Rahmadina, A. A., & Bone, S. (2024). Non-Military Preventive Efforts In Handling Human Rights Violations Against Armed Violent Groups in Papua, Indonesia. Ipso Jure.

<https://doi.org/10.62872/szrvyx47>

Maulidah, K., Sari, R. K., Melissa, A., & Fitryantica, A. (2025). The Urgency of Enacting the Asset Confiscation Bill for the Eradication of Corruption and Money Laundering in Indonesia. Prophetic Law Review.

<https://doi.org/10.20885/plr.vol7.iss1.art5>

- Maysarah, & Yana, T. (2025). Customary Law System and the Influence of Religion on the Indonesian Legal System. *Jurnal Multidisiplin Madani*.
<https://doi.org/10.55927/mudima.v5i10.660>
- Mufti, K. E., Husain, B., & Maryani, A. (2025). The Role of Health Law in Pandemic Preparedness : Lesson from COVID-19. *Ranah Research*. <https://doi.org/10.38035/rrij.v7i5.1695>
- Mujiono, & Ticualu, C. (2025). Emerging Trends in Law and Social Sciences: Global Perspectives on Policy, Ethics, Justice, and Institutional Reform. *International Journal of Law and Social Sciences*. <https://doi.org/10.65960/ijlss.1.1.2025.6>
- Nam, S. (2025). Public Responsibility and Public Law Regulation of Platform Operators : A Focus on the Control of Market Dominance and the Protection of Users. *National Public Law Review*. <https://doi.org/10.46751/nplak.2025.21.3.239>
- Nasution, M., & Yani, M. (2025). Integration of Sharia Values into the Pancasila State Legal System: Constitutional Review of Article 29 of the 1945 Constitution and Actualization of Islamic Law Codification in Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Madani*. <https://doi.org/10.55927/mudima.v5i11.681>
- Noor, R. S., Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., Kristanto, K., & Fransisco. (2024). Gender Equality in Indigenous Peoples in Indonesia (Challenges and Efforts Towards the 2030 Sustainable Development Goals). *Journal of Law and Sustainable Development*.
<https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2173>

- Nova, E. (2025). Implikasi Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Bagi Pembenuhan Keadilan Korban. Unes Journal of Swara Justisia. <https://doi.org/10.31933/vfq8k12>
- Olaoyenikan, I. R. (2025). Rethinking Treaty Interpretation in Investment Treaties: The Coexistence of Investor-State and State-to-State Dispute Settlement Clauses and the Case for State-centric Interpretative Authority in the Global South. *Revista de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales*.
<https://doi.org/10.20511/rdiri.2025.v1n2.2245>
- P, P., Lumbantoruan, R., & Panjaitan, J. D. (2025). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Korban dalam Prespektif Undang-Undang Hukum Hak Asasi Manusia. *Action Research Literate*.
<https://doi.org/10.46799/ar1.v9i7.2998>
- Pahlevi, F. (2022). Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen. STAIN Ponorogo.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>
- Pelupessy, E. (2026). Civil Law Responsibility in Artificial Intelligence-Driven Decision Making. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*. <https://doi.org/10.61942/jhk.v3i2.544>
- Pomaza-Ponomarenko, A., Leonenko, N., Cherniahivska, V., Lehan, I., & Puzanova, G. (2023). Legal Reform and Change: Research on Legal Reform Processes and their Impact on Society. Analysis of Factors that Facilitate or Hinder Legal Change, Including Political, Social, and Economic Factors.

- Journal of Law and Sustainable Development.
<https://doi.org/10.55908/sdgs.v1i10.1854>
- Prameswari, R. S. (2026). Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Baru. Jurnal Sosial Teknologi.
<https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v6i2.32706>
- Priadi, Z. A., & Niandari, T. (2025). Legal Study on the Role of Law in Guaranteeing Freedom of Religion Based on the Principles of Pancasila. International Journal of Sustainable Law.
<https://doi.org/10.71131/pnshvd85>
- Qadriah, F., Ramadi, B., & Aminudin, A. (2025). Efektivitas dan Tantangan Kebijakan Hukum Pidana Korupsi: Perbandingan Indonesia, Singapura, Hong Kong, dan Malaysia. JUNCTO Jurnal Ilmiah Hukum.
<https://doi.org/10.31289/juncto.v7i1.6162>
- Robensyah, A. (2025). Policy Analysis of Amendments to the KPK Law in the Eradication of Corruption in Indonesia. Justice Law Review. <https://doi.org/10.64317/jlr.v1i2.20>
- Rudyarta, R., Ardiyansyah, F., Ibrohim, M., & Ardhya, B. N. (2025). Digital Transformation and the Impact of Business Law in Global Economic Regulation Politics. International Journal of Humanities and Social Sciences Reviews.
<https://doi.org/10.62951/ijhs.v2i4.477>
- Saepullah, B. S. 1 A., Panjaitan, 2. A., Muhammad, A., Aziz, Widayanti, I., & Hasbi, M. Z. N. (2025). A Contemporary Socio-Legal Evaluation of Indonesia's Post-Reformation

- Child Marriage Policies. *MILRev: Metro Islamic Law Review*. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.10322>
- Salim, A., Suryati, S., & Yusoh, R. (2025). LAW ENFORCEMENT AGAINST CORRUPTION IN INDONESIA: BETWEEN EXPECTATION AND REALITY. *LAW REVIEW*. <https://doi.org/10.71250/rlr.v3i2.73>
- Saputra, H., Nofita, H., & Hatta, M. (2025). Regulating Digital Health Services in Indonesia: Legal Challenges, Liability Issues, and the Protection of Patient Rights. *Política*. <https://doi.org/10.32505/politica.v12i2.12878>
- Sidabariba, B. (2024). Consumer Protection on Digital Trading Platforms: An Economic Law Perspective. *Ipsa Jure*. <https://doi.org/10.62872/52d2vt31>
- Simanjuntak, J., Panggabean, M., Pieris, J., & Widiarty, W. S. (2025). Customary Law and Multiple Legal Systems in Criminal Justice: Indonesia's Penal Reform Experience. *Architecture Image Studies*. <https://doi.org/10.62754/ais.v6i3.528>
- Soegiono, A. N., Ningrum, A. P., Ghofiqi, M., Hariani, N., & Supeno, E. (2025). THE PRICE OF POLITICS: INSTITUTIONAL REENGINEERING AS ANTI-CORRUPTION DISMANTLEMENT UNDER JOKOWI'S ADMINISTRATION (2014-2024). *Jurnal Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.14710/jis.24.1.2025.92-121>
- Soesatyo, B. (2025). The Urgency of Asset Confiscation Results of Corruption and Criminal Acts Money Laundering: Solutions to Eradicate Corruption and Reform of National Laws. *Jurnal*

Greenation Sosial Dan Politik.

<https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i4.531>

Soraya, J., & Muslim, S. (2025). The Existence of Pancasila as a National Legal Identity in the Midst of Globalization. *Pena Justisia Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*.
<https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.6489>

Sumardi, S. (2024). Transformation of State Administrative Law in the Digital Government Era. *Journal of Law*.
<https://doi.org/10.70177/rjl.v2i3.1299>

Taufik, Z. (2024). Sharia-based Custom and the Politics of Religious Freedom in Contemporary West Sumatra, Indonesia. *Journal of Southeast Asian Human Rights*.
<https://doi.org/10.19184/jseahr.v8i1.40622>

Trissetianto, A. C. (2025). Legal Analysis of Consumer Data Usage in Digital Marketing. *Siber International Journal of Advanced Law (SIJAL)*. <https://doi.org/10.38035/sijal.v1i3.168>

Wajahat, J., Jan, Dr. M., & Ali, Dr. R. N. (2025). International Law and Sovereignty: Between Legal Obligation and Political Will. *Advance Social Science Archive Journal*.
<https://doi.org/10.55966/assaj.2025.4.1.071>

Widayati, W. (2021). Constitutional Protection Of Citizens In Health Sector (Study of Policies for Handling the Spread of Covid-19 in Indonesia). *Proceeding of International Conference on The Law Development For Public Welfare*.
<https://doi.org/10.30659/picldpw.v1i1.16114>

Wilda Hayatun Nufus, “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2024 Naik Jadi 37, Peringkat 99”, 11 februari 2025, <https://news.detik.com/berita/d-7773057/indeks-persepsi-korupsi-Indonesia-2024-naik-jadi-37-peringkat-99>.

Winarni, A. T., & Bundianto, D. (2024). Digitalization of Bureaucracy and Good Governance. *International Journal of Social Welfare and Family Law*. <https://doi.org/10.62951/ijsw.v1i2.478>

Buku referensi berjudul **Hukum Responsif, Tata Kelola Negara, dan Wajah Baru Keadilan di Masyarakat yang Kritis** membahas bagaimana hukum berkembang mengikuti perubahan sosial yang semakin dinamis dan tuntutan masyarakat yang makin sadar akan hak-haknya. Di tengah perubahan tata kelola negara, keadilan tidak lagi dipahami secara kaku, tetapi bergerak lebih adaptif terhadap kebutuhan publik yang beragam dan kritis.

Melalui uraian yang mudah dipahami, buku ini menggambarkan hubungan antara hukum, negara, dan masyarakat dalam membentuk sistem keadilan yang lebih terbuka dan responsif. Karya ini ditujukan untuk pembaca umum yang ingin memahami bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan sosial modern serta perannya dalam mewujudkan keadilan yang lebih nyata di tengah masyarakat.